

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A, Musman & Mulyadi N, 2021, *Dasar-dasar Jurnalistik Buku Pegangan Wajib Para Jurnalis*, Yogyakarta: Penerbit KOMUNIKA.
- Adji, Oemar Seno, 1977, *Mass Media Dan Hukum*, Cet. 2. Jakarta: Erlangga.
- Adji, Oemar Seno, 1980, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Al-Bukhari, Imam, 1998, *al-Adab al-Mufrad*, Juz 1, Riyadh: Maktabah al-Ma'rif.
- Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, 1999, *Madrijus Salikin: Pendakian Menuju Allah*, Terj: Khatir Suhardi, Cet.2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Qurthubi, Imam, 2009, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Kencana.
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana Prenada Media Group.
- Aro, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengailan Agama*. Cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang, Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Pres.
- Bertens, Koes, 2002, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris Jerman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dasco, Ahmad Sufmi, 2018, *Politik, Media Massa, dan Kebohongan*, Surakarta: UNS Press.
- Djazuli, H.A, 2000, *Fiqh Jinayah Edisi Revisi: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gaos, Hasan. A & Andewi Suhartini, 2005, *Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, Bandung: CV. Insan Mandiri.
- Halim, M, 2009, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta:LBH Pers.
- Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2012, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.

- Hujibers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius
- Jabar, Ahmad Al-Musri Husain, 2009, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Lamuri, Stefanus Felix (ed.), 2007, *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, Jakarta: LBH Pers dan Open Society Institute.
- Lanjah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Syaamil quran*
- Massail, Mujib, 2008, *Fiqiyah Berbagai Kasus Yang dihadapi Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Margiyono, 2010, *Kasus Pencemaran Nama Baik*, Seri Reformasi Kebijakan Media, Seri 2 Jakarta: AJI Indonesia dan DRSP/USAID.
- Marpaung, Leden, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Muslizh, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Miles & Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penentuan Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Shaffat, Idri, 2008, *Kebebasan, Tanggung Jawab, dan Penyimpangan Pers*, Cet.1, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita, 2003, , *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Sianturi, S.R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta: Storia Grafika.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sutyono, Bambang & Sri Hastuti Puspita Sari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres.
- Syahriar, Irman, 2015, *Penegakan Hukum Pers*, Surabaya: Aswaja Pressindo.

- Triwardani, Reny, 2010, *Pembredelan Pers di Indonesia dalam Prespektif Politik Media*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wahidin, Samsul, 2012, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Waluyo, Bambang, 2012, *Pidana dan pemedanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Adonara, Firman Floranta, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*. Junral Konstitusi, Vol. 12 No.12 (Juni, 2015), Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Akbar, Teuku Hanif & Husni Jalil, 2019, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Akibat Pemberitaan Media Pers (Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)*, jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 (1).
- Darsi, darsi & Halil Husairi, 2019, *Ta'zir dalam Prespektif Fiqh Jinayah*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 16.
- Manin, Bagar, 2015, *Penghinaan Terhadap Pengadilan Pers Versus Kebebasan Pers*, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 4, No. 2. Indonesia: Mahkamah agung RI.
- Mufti, Nurlatifah, 2018, *"Posisi Undang-undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital"*, Profetik Jurnal Komunikasi Vol. 11, No. 01.
- Nurhalifah & Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Banda Aceh: Fakultas Hukum UNSYIAH.
- Permana, LH, 2016, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*, Lampung: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Setyarini, Ika, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pada Kasus Tindak Pidana peredaran Uang Palsu (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*, Brawijaya University: Doctoal Dissertation.
- Shidiq, Ghofar, 2009, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV, No. 118.

- Sidharta, B. Arief, 2004, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*. Jentera: Jurnal Hukum Vol. II, No. 3.
- Usamah, 2019, *Takzir Sebagai hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Kanun, Vol. 21. No. 2.
- Wijayanti, Nur Alfi, 2023, Skripsi: *Analisis Hak Kebebasan Pers Dalam Peliputan Melalui Media Online (Studi Kasus Peliputan Projectmultatuli.org)*, Surakarta: Repository UNS.

### **Media Elektronik**

- Aliansi Jurnalis Independen (AJI), *Data Kekerasan: Total Laporan*, <https://advokasi.aji.or.id/index/data-kekerasan.html>, diakses Sabtu, 17 februari 2024, pukul 22.10 WIB
- BandungBergerak.id, Senin, 27 Desember 2021. *Jerat UU ITE Bagi Jurnalis dan Jalan Memutar Penyelesaian Sengketa Pers*, dalam <https://bandungbergerak.id/article/detail/1948/jerat-uu-ite-bagi-jurnalis-dan-jalan-memutar-penyelesaian-sengketa-pers/>, dilihat Selasa, 28 November 2023, pukul 00:05 WIB
- CNN Indonesia, Senin, 17 Januari 2022, 21:06 WIB: *Komnas HAM: Jurnalis Jadi Korban Teror Terbanyak Sepanjang 2020-2021*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117182953-12-747745/komnas-ham-jurnalis-jadi-korban-teror-terbanyak-sepanjang-2020-2021>, dilihat Selasa, 28 November 2023, pukul 23.57 WIB.
- Dewan Pers, 2012, *Pedoman Pemberitaan Media Siber*, dalam [https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253\\_2012\\_PEDOMAN\\_PEMBERITAAN\\_MEDIA\\_SIBER.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf), Diakses pada Minggu, 18 Februari 2024, pukul 01.29 WIB
- Dewan Pers, 2022, *Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dan POLRI*, dalam [https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/2205140743\\_NOTA\\_KESEPAHAMAN\\_DEWAN\\_PERS\\_DENGAN\\_KAPOLRI.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/2205140743_NOTA_KESEPAHAMAN_DEWAN_PERS_DENGAN_KAPOLRI.pdf), Diakses pada Minggu, 18 Februari 2024, Pukul 01.53 WIB
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Ringkasan Eksekutif Pandemi Covid-19: *Kebebasan Pers & Keselamatan Jurnalis dalam Krisis*, dalam <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Ringkasan-Eksekutif-Penelitian-ICJR-LBH-Pers-IJRS-Pandemi-Covid-19-Kebebasan-Pers-dan->

*Keselamatan-Jurnalis-dalam-Krisis.pdf*, Diakses pada Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 22.56 WIB

Oktavianus, Fanny, “*AJI: 3 Tahun Terakhir Ada 15 Jurnalis-Media Yang Dijerat UU ITE*”, [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses 26 Mei 2023

RSF: Reporter Without Borders, Lembar Data *World Press Freedom Index* Negara Indonesia, <https://rsf.org/en/country/indonesia>. Diakses pada Rabu, 3 Januari 2024 02.20

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor. 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp